

Judul : Ancaman Kebangsaan Masih Nyata
Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Ancaman Kebangsaan Masih Nyata

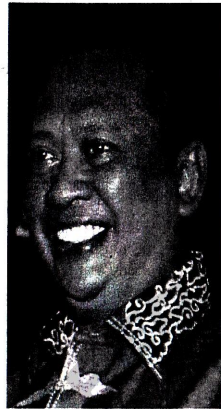
Menteri Baru Diharapkan Mampu Menggencarkan Antiradikalisme

[JAKARTA] Peringatan 91 tahun Sumpah Pemuda harus menjadi tonggak baru bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum muda, untuk memantapkan langkah dalam membunikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman terhadap kehidupan kebangsaan saat ini, seperti ancaman radikalisme, ekstremisme, dan ideologi transnasional.

Demikian pandangan Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, di Jakarta, Senin (28/10), terkait peringatan Sumpah Pemuda.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, saat ini Indonesia hidup di era globalisasi, yang ditandai dengan kecepatan dan kemudahan arus informasi dan komunikasi. Hal ini memberikan banyak peluang bagi kemajuan bangsa. Namun, pada saat yang bersamaan juga membawa ancaman, terutama terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta warisan kearifan-kearifan lokal bangsa Indonesia. Terkait dengan momentum Sumpah Pemuda, ancaman tersebut berpotensi menggerus semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yang diikrarkan para pemuda pada 28 Oktober 1928.

"Sebab dengan membongkar fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis dan masif. Nilai-nilai itu seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya



Bambang Soesatyo

kesenjangan sosial, karena masih terjadi sentralisasi pembangunan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, meluasnya kesenjangan sosial antarpelaku ekonomi dan kebijakan ekonomi yang mengedepankan sektor ekstraktif yang kurang mengembangkan nilai tambah.

Keempat, pelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.

Kelima, adalah keteladanan Pancasila. Dalam konteks ini, tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintahan dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan semakin maraknya sikap dan perilaku destruktif yang lebih mengedepankan hal-hal

negatif di ruang publik. "Serta kurangnya apresiasi dan insentif terhadap prestasi dan praktik-praktik yang baik," ujar Bamsoet.

Pembangunan SDM

Dia meyakini, melalui semangat hari Sumpah Pemuda, para anak-anak muda milenial akan terus melahirkan pemikiran-pemikiran atau gagasan-gagasan yang bernas untuk mengatasi berbagai tantangan global. Untuk itu, upaya pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Joko-Wi-Ma'ruf) yang menitikberatkan pada pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Indonesia ke depan membutuhkan generasi muda yang unggul, yang berkarakter Pancasila, yang toleran, dan yang berakhlak mulia. Karenanya, kita butuh SDM unggul yang terus belajar, bekerja keras, serta berdedikasi tinggi," kata politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Adi Prayitno menilai, pemerintahan Jokowi akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dari sebelumnya di dalam berbagai bidang. Termasuk bidang pengentasan kemiskinan, lapangan pekerjaan, hingga masalah ancaman radikalisme di Indonesia.

"Masuknya sejumlah purnawirawan tentara dan polisi menjadi menteri menegaskan Jokowi serius dengan memberantas radikalisme. Apalagi radikalisme sudah mendarah daging di sejumlah kementerian," kata Adi.

Peran Kementerian

Saat ini, menurutnya, ada sejumlah kementerian negara yang dianggap strategis menjadi ujung tombak melawan radikalisme. Di antaranya

seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semua kementerian itu diharapkan mampu mendiagnosis persoalan penting dan mendorong gerak kementerian yang disebabkan faktor internal atau pengaruh dunia internasional.

"Jika ada yang tak mau bertobat, misalnya ASN (aparatur sipil negara) terpapar radikalisme harus diberhentikan. Sementara peran Kemendikbud dan Kemenag lebih pada upaya persuasif melakukan upaya deradikalisasi yang terukur, sistematis, dan masif," jelasnya.

Saat ini, menurut Adi, negara memiliki berbagai instrumen untuk melakukan itu semua. Namun, tentunya harus dapat lebih dimaksimalkan agar dapat berkontribusi nyata dalam memerangi segala macam bentuk ancaman radikalisme.

"Pemilihan menteri agama dan mendikbud yang ke luar dari pakem politik adalah ikhtiar Jokowi untuk melakukan manuver besar di dua kementerian itu, sehingga dihaapkan bisa melakukan lompatan jauh ke depan," ujarnya.

Namun demikian, diingatkan, pemerintah tentunya juga harus mengedepankan cara-cara persuasif untuk menangani masalah radikalisme. Jika tidak, maka akan menimbulkan masalah lain yang tidak diharapkan semua pihak. "Jadi, cara persuasif harus diutamakan. Cara militeristik digunakan jika keadaan sudah sangat mendesak dan darurat," katanya.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting bahwa di hari Sumpah

Pemuda, yakni para elit harus ikhlas membangun bangsa tanpa pamrih apapun. Dicontohkan, anak-anak muda jaman dahulu adalah anak muda yang bekerja tulus ikhlas untuk mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya.

"Mereka adalah anak muda yang tak patah semangat meski tak mendapat jabatan strategis. Mengabdikan pada negara tak harus jadi menteri, tak harus jadi DPR, tak harus jadi kepala daerah," ujarnya mengingatkan.

Saat ini ada banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk membangun bangsa. Yang terpenting, keikhlasan anak muda jaman dahulu inilah yang harus diteladani politisi sekarang yang terlampau pragmatis. "Jangan hanya karena tak dipilih menjadi menteri semangat membangun bangsa punah. Itu langkah keliru," kata Adi.

Sementara itu, melalui akun Twitter-nya, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemuda bersama-sama membangun bangsa memperingati perayaan Sumpah Pemuda. "Saya mengajak para pemuda bergandengan tangan, menggerakkan Indonesia, sekarang dan akan datang," demikian cuitan Presiden dalam akun Twitter @jokowi, Senin (28/10).

Menurut Jokowi, semangat Sumpah Pemuda masih terus menggema hingga saat ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap pemuda terus memajukan bangsa dan negara.

"Sudah 91 tahun berlalu, tapi ikrar pemuda Indonesia dari seluruh Nusantara yang berkumpul pada 28 Oktober 1928 itu tetap menggema hari ini," kata Jokowi. [MJS/Y-7]